

SKRIPSI

**ANALISIS PENGHIDUPAN DAN POLA MIGRASI
DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA DESA
CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

ALL USMAN MUCHAZRIN RIMOSAN

M011171701



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGHIDUPAN DAN POLA MIGRASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

ALL USMAN MUCHAZRIN RIMOSAN
M011171701

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin
pada tanggal 1 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si.
NIP. 197908312008121 002

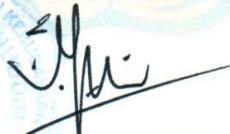
Pembimbing II



Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, MP.
NIP. 198604032014041002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**



Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.
NIP. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : All Usman Muchazrin Rimosan
NIM : M011171701
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Analisis Penghidupan Dan Pola Migrasi Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa
Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, serta penghargaan yang sebesar-besarnya atas kutipan yang bersumber dari tulisan penulis terdahulu.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 1 Maret 2024

Yang Menyatakan



All Usman M. Rimosan

ABSTRAK

All Usman Muchazrin Rimosan (M01171701). Analisis Penghidupan Dan Pola Migrasi Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros di bawah bimbingan Muhammad Alif KS. dan Emban Ibnurusyd Mas'ud

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola migrasi penduduk Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros, dalam konteks pengelolaan hutan dan penghidupan masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, data tentang migrasi dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi penduduk Desa Cenrana Baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan ekonomi, pembatasan lahan, dan konflik antara sektor pertanian dan peternakan. Migrasi tersebut cenderung bersifat sementara dan dilakukan untuk meningkatkan penghasilan atau mencari peluang ekonomi di luar desa. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan hutan untuk mempertimbangkan dampak migrasi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang kompleksitas pola migrasi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan penghidupan di wilayah pedesaan.

Kata kunci: Penghidupan masyarakat, Migrasi penduduk, Pengelolaan hutan, Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros.

KATA PENGANTAR

Bismillah Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T. Tuhan yang maha Esa. Serta Junjungan NabiAllah Muhammdad S.a.w. Atas kasih, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pemanfaatan dan Pola Migrasi Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros“. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Dengan adanya arahan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa pengetahuan, dorongan moril dan bantuan materil, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si.** dan Bapak **Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut, MP.** Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ungkapkan dan persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **’Salim Rimosan** dan Ibunda **Amina Serbunit’** yang senantiasa mendoakan, memberi perhatian, nasehat yang luar biasa, dan kasih sayang serta telah menjaga, merawat dan mendidik penulis hingga bisa melangka sejauh ini, hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk menggapai setiap pencapaian membanggakan dalam setiap proses yang ditempu penulis, serta kepada saudari saya Siti Chatija Rimosan dan Paulina Boari yang juga senantiasa mendoakan, mendukung ,memberi perhatian yang luar biasa kepada penulis, semoga senantiasa penulis dan saudari mampu membahagiakan dan membanggakan keluarga.

Penghargaan yang tulus dan ucapan banyak terimakasih dengan penuh keiklasan penulis ucapkan kepada:

1. Ibu **Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D** dan Ibu **Dr. Astuti, S.hut, M.Si.** selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran serta koreksi guna penyempurnaan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Sahriyanti Saad selaku dosen Pendamping Akademik
4. Keluarga Rimosan, Serbunit, Karoror, Kilian dimana senantiasa dengan ikhlas memberi motivasi dan mendukung materil penulis dalam menjalankan penelitian ini hingga selesai.
5. **L.A.P.** (Literasi Anak Papua), **IMP-Unhas** (Ikatan Mahasiswa Papua Unhas), **IPMAFAK Makassar** (Ikatan Pelajar Mahasiswa Fakfak) yang selama ini menjadi wadah atau tempat belajar di luar bangku kuliah. Terima kasih untuk kebersamaannya, serta segala ilmu, kesempatan dan pengalaman berharganya
6. Saudara/saudari **Afirmasi Unhas Angkatan 2017** (Mariyes Windesi, Ridwan, Alfin, Betuel, Athanasius, Herry, Habel, Fredy, Ambro, Sem, Jembrif, Yustinus, Lenius, Ketty, Elsy, Heni ,Grace, Imba, Marlince, Sarlota, Bernadeta.
7. **FRAXINUS** angkatan 2017 saya ucapkan banyak terima kasih untuk segala dukungan dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga akhir study.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, 1 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Penghidupan..... | 6 |
| 2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)..... | 7 |
| 2.3 Dampak HKm Bagi Hutan Dan Masyarakat | 8 |
| 2.4 Migrasi | 9 |
| 2.4.1 Pengertian Mobilitas Penduduk..... | 9 |
| 2.4.2 Determinan Mobilitas Penduduk..... | 10 |
| 2.5 Biaya..... | 11 |
| 2.6 Penerimaan..... | 12 |
| 2.7. Pendapatan..... | 13 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| III. METODE PENELITIAN | 17 |
| 3.1 Waktu dan Tempat | 17 |
| 3.2 Alat dan Bahan..... | 18 |
| 3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian | 18 |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data..... | 19 |

| | | |
|-------|---|----|
| 3.5 | Metode Pengumpulan Data..... | 19 |
| 3.6 | Analisis Data..... | 20 |
| IV. | HASIL DAN PEMBAHASAN | 22 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Peneliiian | 22 |
| 4.2 | Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cenrana Baru | 22 |
| 4.2.1 | Pemerintah Desa | 23 |
| 4.2.2 | Penduduk desa Cenrana Baru | 25 |
| 4.2.3 | Organisasi Kemasyarakatan/perkumpulan | 25 |
| 4.2.4 | Infrastruktur | 25 |
| 4.2.5 | Perekonomian. | 26 |
| 4.2.6 | Data Karakteristik Responden | 26 |
| 4.2.7 | Aktifitas Dan Penghasilan | 28 |
| 4.3 | Pola Pemanfaatan Lahan | 28 |
| 4.3.1 | Pertanian | 28 |
| 4.3.2 | Perkebunan | 29 |
| 4.3.3 | Peternakan | 29 |
| 4.3.4 | Kehutanan..... | 29 |
| 4.3.5 | Jasa Lingkungan..... | 30 |
| 4.4 | Skema Migrasi Masyarakat | 30 |
| 4.4.1 | Faktor Penyebab Migrasi..... | 30 |
| 4.4.2 | Remitansi Atau Pendapatan Dari Migrasi | 32 |
| 4.5 | Analisis data..... | 34 |
| V. | PENUTUP | 35 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 35 |
| 5.2 | Saran..... | 35 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 36 |
| | LAMPIRAN | 39 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| Tabel 1. | Data Responden Menurut Jenis Kelamin | 26 |
| Tabel 2. | Data Responden Menurut Usia | 27 |
| Tabel 3. | Data Responden Menurut Jenis Pekerjaan..... | 27 |
| Tabel 4. | Data Responden Menurut Pendidikan | 27 |
| Tabel 5. | Remitansi Yang Didapatkan Berdasarkan Pengamatan Dan Wawancara | 33 |
| Tabel 6. | Hasil Perhitungan Data | 34 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul | Halaman |
|---------------|---|----------------|
| Gambar 1. | Peta Lokasi Penelitian..... | 17 |
| Gambar 2. | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cenrana Baru..... | 23 |
| Gambar 3. | Struktur Organisasi Badan Pengurus Daerah (BPD) Kecamatan Cenrana Baru Kabupaten Maros | 24 |
| Gambar 4. | Peta Sebaran Migrasi Masyarakat Desa Cenrana Baru | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Judul | Halaman |
|-----------------|---|----------------|
| Lampiran 1. | Biodata Responden | 40 |
| Lampiran 2. | Data Penghasilan Dan Luas Wilayah | 41 |
| Lampiran 3. | Panduan Wawancara | 42 |
| Lampiran 4. | Dokumentasi Penelitian..... | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah lain menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. (Santoso, 2007) dalam bukunya yang berjudul "Pola Migrasi di Pedesaan" mengungkap migrasi penduduk dari desa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih lanjut, (Scones, 2015) mengungkap bahwa migrasi adalah salah satu strategi penghidupan masyarakat di pedesaan.

Beberapa teori migrasi menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya perpindahan penduduk, seperti perbedaan dalam memperoleh pendapatan dan lingkungan kehidupan yang layak, ketimpangan ekonomi yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya, faktor jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan, yang disebut sebagai rintangan antara, juga sangat menentukan keputusan seseorang untuk bermigrasi (Munir, 2011).

Jenis migrasi terbagi atas beberapa kategori perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain seperti yang di jelaskan dalam (Taylor, 1999) menyebutkan beberapa jenis migrasi antara lain; Migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi di dalam suatu negara, seperti ketika seseorang pindah dari pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan. Migrasi internasional di sisi lain, melibatkan perpindahan penduduk antar negara, seperti ketika seseorang pindah dari negara asalnya ke negara lain untuk bekerja atau menetap. Migrasi permanen terjadi ketika seseorang pindah ke tempat baru secara tetap. Migrasi sementara melibatkan perpindahan yang bersifat sementara, seperti migrasi musiman di antara daerah pertanian atau migrasi untuk pekerjaan kontrak. Migrasi paksa terjadi ketika penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena konflik, perang, atau bencana alam. Dan Migrasi sukarela terjadi atas keinginan sendiri, biasanya untuk meningkatkan kualitas hidup atau mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

Model migrasi adalah konsep atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami pola, faktor, dan dampak dari perpindahan penduduk. Beberapa model migrasi yang umum digunakan meliputi: (Lee, 1966)

1. Model Gravitasi: Perpindahan penduduk antara dua lokasi dipengaruhi oleh ukuran dan jarak relatif dari lokasi tersebut. Semakin besar ukuran populasi di dua lokasi dan semakin dekat jarak antara keduanya, semakin besar kemungkinan terjadinya migrasi.
2. Model Push-Pull: Menekankan adanya faktor dorongan (*push*) yang mendorong individu untuk meninggalkan suatu tempat dan faktor tarikan (*pull*) yang menarik individu untuk pindah ke tempat lain. Faktor dorongan bisa berupa konflik, kemiskinan, atau kurangnya lapangan kerja, sedangkan faktor tarikan bisa berupa kesempatan pekerjaan, keamanan, atau kualitas hidup yang lebih baik.
3. Model Transisi Demografi: Menunjukkan bagaimana pola migrasi berkaitan dengan tahapan pembangunan suatu masyarakat. Pada tahap awal pembangunan, biasanya terjadi migrasi dari pedesaan ke perkotaan, namun pada tahap selanjutnya, migrasi bisa terjadi dari kota kembali ke pedesaan atau antara daerah-daerah yang lebih kecil.
4. Model Jaringan: Migrasi dipengaruhi oleh hubungan sosial dan jaringan yang ada di antara individu-individu. Migrasi cenderung terjadi ke tempat-tempat di mana individu memiliki hubungan sosial atau keluarga yang sudah ada.

Faktor yang mempengaruhi migrasi terhadap kondisi individu atau kelompok seperti yang diungkapkan, (Lee, 1976) menjelaskan terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses migrasi penduduk antara lain, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan, Faktor-faktor daerah asal dan daerah tujuan. Migrasi di satu wilayah berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah-daerah di dalam wilayah tersebut. Bila melukiskan di daerah asal dan daerah tujuan, (Erlando, 2013) menyebutkan ada faktor positif, faktor negatif dan adapula faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang memberi nilai yang menguntungkan jika bertempat tinggal di daerah tersebut,

misalnya di daerah tersebut terdapat kesempatan kerja, dan iklim yang baik. Sedangkan faktor negatif adalah faktor yang meliputi kekurangan lapangan kerja dan ketidak stabilan pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Sedangkan faktor netral ialah ketika individu ingin mencari pengalaman baru atau ingin tinggal dekat dengan keluarganya tanpa adanya faktor positif dan faktor negatif.

Dikutip dari buku (Scoones, 2015) yang berjudul, *Penghidupan Berkelanjutan Dan Pembangunan Pedesaan*. “ Penghidupan menekankan pada keberagaman cara bagaimana manusia memperoleh nafkah dan menjaga keberlanjutan ekosistem yang mereka tinggal. Sedangkan strategi penghidupan yaitu, tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan hidup mereka termasuk melalui penggunaan sumber daya alam, hubungan sosial dan strategi ekonomi”. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal memperhatikan dinamika politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial (Scoones, 2015).

Kebijakan pengelolaan hutan termasuk salah satu Faktor yang mempengaruhi strategi penghidupan, dimana regulasi pemerintah terkait perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mempengaruhi akses masyarakat terhadap hutan serta cara mereka mengelola sumber daya hutan, dalam hal ini Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat, dalam pengelolaan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan untuk masyarakat petani hutan (Rosalia, 2016). Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan dan perambahan kawasan hutan. Program ini diharapkan dapat mengatasi aktivitas masyarakat terhadap tekanan sumber daya hutan. Lahan hutan dikelola secara bersama oleh kelompok tani melalui skema HKm. Kelompok tani hutan (KTH) adalah kumpulan petani yang bermukim di

sekitar hutan yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar Kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Masyarakat desa biasanya bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perkembangan global dan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak, hubungan antara masyarakat desa dengan sumber daya alam di desa menjadi sangat penting untuk dipahami. Masyarakat desa seringkali bergantung pada sumber daya alam untuk penunjang kehidupan, seperti sumber air, pangan, dan material bangunan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan berdampak negatif pada keberlanjutan ekosistem. (Dharma, 2006) mengatakan bahwa salah satu bentuk permasalahan air di Indonesia adalah ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Oleh karena itu, memahami hubungan antara masyarakat desa dan sumber daya alam serta pola interaksi yang terjadi, menjadi kunci dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Seperti yang di sebutkan (Husein, 1995) dalam bukunya, "karena manusia adalah komponen makhluk hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan begitu juga sebaliknya, lingkunganpun mempengaruhi manusia sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan sumber daya alam. Inilah yang disebut interaksi manusia dan lingkungan".

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam dinamika kehidupan dan pola migrasi penduduk Desa Cenrana Baru. Adanya tekanan ekonomi, perubahan iklim, serta kebijakan pengelolaan hutan yang semakin ketat telah membentuk pola-pola dimana masyarakat menggunakan strategi kehidupan baru dalam cara mengelola sumber daya alam hutan yang berujung pada pilihan bermigrasi. Dalam artikel "Migrasi dan Perubahan Sosial di Desa", dari Jurnal Antropologi, (Fitriani R, 2020). disebutkan bahwa migrasi dapat membawa dampak perubahan sosial yang signifikan di masyarakat desa.

Kondisi ekonomi global dan lokal mempengaruhi harga hasil hutan yang dijual, memberikan tekanan tambahan pada pendapatan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan dan transportasi juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam

mengakses pasar dan layanan ekonomi lainnya. kesempatan kerja di luar sektor pertanian juga menjadi faktor penentu pola migrasi penduduk. Dengan melihat kondisi lapangan terhadap kehidupan masyarakat Desa Cenrana Baru, dalam segi pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan, kurangnya keterampilan dalam mengelola hutan pinus dan pembatasan pembukaan lahan baru, serta informasi peluang penghasilan yang lebih menjanjikan yang di tawari kerabat juga menjadi motivasi masyarakat melakukan migrasi.

Peristiwa perginya masyarakat dari kampung halaman yang terjadi di Desa Cenrana Baru, Kabupaten Maros. Masyarakat dari desa Cenrana Baru bepergian ke Kolaka Utara secara bersamaan sejak Tahun 1999 sampai tahun 2006 tetapi migrasi tersebut berangsur-angsur hingga saat ini. Mereka meninggalkan kampung halamannya lalu membuat perkebunan cengkeh, coklan dan nilam di daerah tujuan. Selain itu, ada juga yang bermigrasi ke luar daerah seperti makassar, Soppeng, kalimantan, Papua dan luar negeri seperti ke Malaysia. Sehingga peneliti mengajukan judul "Analisis Penghidupan Dan Pola Migrasi Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros".

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menelusuri sumber penghidupan masyarakat Desa Cenrana Baru.
2. Menganalisis pola migrasi masyarakat di Desa Cenrana Baru dalam kaitannya dengan penghidupan di desa.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek yaitu, aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis, untuk memperkaya referensi dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan.
2. Aspek praktis, untuk memberikan kontribusi atas permasalahan yang timbul dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penghidupan

Hutan Indonesia telah lama dikelola dengan paradigma *scientific forestry* (Kartodihardjo, 2012; Safitri, 2015). Hutan diklasifikasikan melalui pertimbangan politis dan administratif yang cenderung menguntungkan kepentingan ekonomi kaum elite semata. Kebijakan atas hutan tidak memberikan manfaat bagi rakyat kecil, bahkan menyingkirkan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan, dan sekaligus mengancam kehidupan dan penghidupan mereka (Fay, 2005). Berkaca dari pengalaman tersebut kebijakan pengelolaan hutan kemudian mengalami pergeseran di mana masyarakat mulai diakomodasi dalam pengelolaan hutan. Lahirlah kemudian konsep yang dikenal *community based forest management (CBFM)*. Hutan Kemasyarakatan (HKm/*Community Forestry*) lahir dari perubahan kebijakan tersebut dan memiliki tujuan melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan hutan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai ancaman namun sebaliknya sebagai pihak yang berperan dalam menjaga kelestarian sekaligus mendapatkan manfaat dari hutan. Studi yang dilakukan di Namibia (Farrington et.al, 1999) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam/ hutan sangat selaras dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi penghidupan (*livelihood*) merupakan kemampuan, aset, dan kegiatan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Tipologi strategi yang terbentuk ini tidak terlepas dari sumberdaya yang dimiliki dan kondisi lingkungan yang menghasilkan kombinasi hubungan antar komponen dan pilihan strategi penghidupan (Baiquni, 2007). Untuk itu perlu dikaji pula latar belakang lingkungan fisik dan keberadaan sumberdaya pada wilayah yang dihuni, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengolah sumberdaya sebagai bentuk hubungan antara masyarakat dengan lingkungan fisiknya. Hubungan timbal balik antara masyarakat dengan kondisi lingkungan dalam pembentukan strategi penghidupan selain memberikan informasi untuk

pengelolaan kebencanaan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam rencana pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

2.2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat di dalam dan sekitarnya. Hutan juga merupakan lahan di mana masyarakat menggantungkan hidup darinya. Oleh karena itu pengelolaan hutan juga melibatkan masyarakat. Namun demikian, warisan kolonial Belanda dalam pengelolaan hutan menegaskan kehadiran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat bahkan dipandang sebagai pihak yang mengancam kelestarian hutan sehingga keberadaannya harus dikeluarkan dari kawasan hutan (Peluso, 1992). Dua dekade berjalan, arah kebijakan pemerintah dan agenda global kemudian mengarah pada aspek lingkungan dan sosial dalam program pembangunan, termasuk dalam pembangunan kehutanan. Kebijakan ini berpengaruh terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak. Hal ini berpengaruh bukan saja terhadap bagaimana tutupan hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek penghidupan masyarakat (Poffenberger, 2006). Kondisi tersebut mendasari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dari sini dapat dipahami bahwa HKm merupakan salah satu pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri secara umum memiliki tiga tujuan pokok, diantaranya: (1) mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, (2) pemberdayaan masyarakat, dan (3) meningkatkan kualitas hutan dalam hal ini tutupan dan keanekaragaman hayatinya (Maryudi dkk., 2012).

Dibandingkan pola perhutanan sosial lain, HKm merupakan salah satu pola perhutanan sosial yang paling awal diimplementasikan. Ini diwujudkan dengan turunnya SK Menhut No. 622 Tahun 1995 (Zakaria dkk., 2018; Suharjito, 2017). Terakhir aturan tentang HKm direvisi dengan Permenhut No. 37 Tahun 2007. Setelah program HKm, kemudian turun kebijakan lain terkait perhutanan sosial yakni Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada tahun 2007, Hutan Desa (HD) tahun 2008 (Suharjito, 2017), Kemitraan Kehutanan (KK) tahun 2013 (Adnan, Berliani, Hardiyanto, Suwito, & Sakti, 2015), dan Hutan Adat (HA) pada tahun 2015 (Permen LHK No. 32 Tahun 2015 dalam Wibowo, 2019). Berdasarkan Permenhut No. 37 Tahun 2007, HKm diberikan hak pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan evaluasi setiap lima tahun. Berdasarkan Permenhut No. 83 Tahun 2016 menyatakan bahwa kelompok masyarakat maupun gabungan kelompok tani hutan dan koperasi dapat mengajukan izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada kementerian agar mendapatkan izin pengelolaan hutan. Pemberian IUPHKm tersebut kemudian dapat didelegasikan kepada gubernur, dengan syarat bahwa perhutanan sosial (termasuk HKm) masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau terdapat peraturan gubernur yang khusus mengatur tentang hal tersebut. (Nurfitriani & Alviya 2019) menyarankan agar pemerintah daerah menjadikan program perhutanan sosial sebagai program utama yang masuk dalam RPJMD sehingga kewenangan dalam perizinan perhutanan sosial didelegasikan kepada pemerintah daerah.

2.3. Dampak HKm bagi Hutan dan Masyarakat

Alokasi lahan untuk perhutanan sosial, termasuk untuk HKm, memiliki empat prioritas utama yang hendak dicapai. Prioritas pertama adalah mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu perambahan kawasan hutan. Berikutnya berkaitan dengan masalah ekonomi yakni untuk memberikan sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan. Ketiga adalah masalah kelembagaan yakni menciptakan jaringan pemasaran produk hasil hutan komersial dari program perhutanan sosial. Keempat adalah aspek sosial, yakni alokasi lahan perhutanan sosial sebagai sarana resolusi konflik tenurial dimana selama ini banyak terjadi antara masyarakat

dengan pemerintah (Nurfitriani & Alviya, 2019). Perhutanan sosial sebagai sarana resolusi konflik disebabkan adanya fakta bahwa konflik banyak disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, dan adanya perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat (Sumanto, 2009). HKm sebagai bagian dari program perhutanan sosial juga memiliki manfaat baik dari aspek ekonomi, ekologi, kelembagaan maupun sosial bagi masyarakat sekitar. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas HKm. Pada kawasan hutan produksi, masyarakat dapat memanfaatkan baik hasil hutan kayu (HHBK) maupun bukan kayu, sementara itu pada kawasan hutan lindung, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber penghasilan ekonomi keluarga. (Astuti, dkk., 2020) menyatakan bahwa dengan penanaman HHBK, masyarakat tidak saja mendapatkan manfaat ekonomi, mereka juga sekaligus meningkatkan manfaat ekologi hutan dengan meningkatnya tutupan hutan.

2.4. Migrasi

Migrasi dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan merupakan suatu peristiwa yang mungkin berulang beberapa kali sepanjang hidup seseorang. Hampir semua definisi menggunakan kriteria waktu dan ruang, sehingga perpindahan yang termasuk dalam proses migrasi setidaknya-tidaknya dianggap semi permanen dan melintasi batas-batas geografis tertentu. (Lee, 1969) sebagaimana dikutip (Rusli, 1996) dalam (Tamari, 1999). menggambarkan migrasi sebagai “perpindahan yang permanen atau semi permanen”, sedangkan (Mangalam, 1968) sebagaimana dikutip (Rusli, 1996) dalam (Tamari, 1999). menyebutkannya sebagai “perpindahan yang relatif permanen dari suatu kelompok yang disebut kaum migran, dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. (Perserikatan Bangsa-bangsa, 1973), mengartikan seorang migran jangka panjang sebagai orang yang bermaksud lebih dari 12 bulan, tetapi belum tentu masing-masing migran tetap melaksanakan niatnya yang semula (Elspeth Young, 1987).

2.4.1. Pengertian Mobilitas Penduduk

Pengertian Mobilitas Penduduk Sebelum mengupas lebih jauh tentang migrasi penduduk, pada uraian ini akan diawali dengan membahas pengertian

mobilitas penduduk. Secara umum dibedakan antara mobilitas penduduk secara horizontal dan mobilitas penduduk secara vertikal. Mobilitas penduduk yang akan dibahas pada uraian berikut ini ditekankan pada mobilitas penduduk secara horizontal atau geografis, yang meliputi semua gerak penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula (Mantra, 2003). Batas wilayah yang dimaksud di sini adalah batas wilayah administrasi yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, atau dusun. Bentuk-bentuk mobilitas dibedakan menjadi mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk nonpermanen atau mobilitas sirkuler. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap di daerah tujuan. Sementara itu mobilitas nonpermanen adalah gerak penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Secara operasional, migrasi penduduk dapat diukur menurut ruang dan waktu, seperti yang digunakan dalam Sensus Penduduk. Dalam Sensus Penduduk, seseorang disebut sebagai migran, apabila orang tersebut melintasi batas wilayah provinsi dan lamanya bertempat tinggal di daerah tujuan minimal 6 bulan. Mengenai batas wilayah ini, sejak (Sensus Penduduk, 2000) dikembangkan pula batas wilayah kabupaten. Namun demikian, dalam kajian ini karena ada maksud untuk membandingkan dan melihat kecenderungan pola dan arah migrasi penduduk, batas wilayah yang digunakan adalah batas wilayah provinsi.

2.4.2. Determinan Mobilitas Penduduk

Salah satu teori determinan mobilitas penduduk yang dikemukakan oleh Wolpert (dalam Mantra, 2003) menggunakan pendekatan teori kebutuhan (*need and stress*). Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa setiap individu mempunyai bermacam-macam kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Selanjutnya menurut (Todaro dan Smith, 2006) yang menggunakan pendekatan ekonomi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan adalah (1) adanya perbedaan upah riil yang diharapkan dengan perbedaan aktual upah riil antara daerah perkotaan dan pedesaan; dan (2) kemungkinan berhasil mendapatkan pekerjaan di

sektor modern di perkotaan. Kemungkinan mendapat pekerjaan di perkotaan berbanding lurus dengan tingkat kesempatan kerja di perkotaan, atau berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.

Berbeda dengan pendapat Wolpert serta (Todaro, dkk., 1970) dalam (Dewi, dkk., 2019) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan bermigrasi yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal; (2) faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan; (3) penghalang antara; dan (4) faktor individu. Lee berpendapat bahwa di masing-masing daerah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan terdapat keanekaragaman kondisi fisik, ekonomi, maupun sosial yang dapat dikategorikan positif (+), negatif (-), dan faktor-faktor netral (0). Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya tersedianya kesempatan kerja, fasilitas pendidikan anak-anak, atau iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Faktor netral (0) adalah faktor yang tidak berpengaruh sama sekali pada ada tidaknya niat berpindah dari seseorang. Faktor berikutnya adalah penghalang antara, bukan hanya dalam artian fisik, namun tersedia tidaknya biaya untuk berpindah juga memegang peranan penting. Faktor yang terakhir adalah faktor individu, bahwa penilaian positif, negatif, atau netral terhadap faktor-faktor tersebut sangat ditentukan oleh individu yang bersangkutan.

Di Indonesia, penduduk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lain tapi masih di wilayah Indonesia (*migrasi internal*). Penduduk Indonesia juga melakukan migrasi dari Indonesia ke negara lain (*migrasi internasional*) dan juga urbanisasi yang menimbulkan migrasi dari suatu kota ke kota lain yang berdekatan tanpa bermaksud tinggal secara permanen, yang dikenal dengan migrasi ulang alik (*commuter migration*).

2.5. Biaya

Definisi biaya dalam artian luas adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya merupakan sumber

ekonomi untuk memperoleh harga pokok. Biaya dalam perspektif konsumen adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mengkonsumsi sejumlah produk baik barang ataupun jasa. Sedangkan , biaya dalam perspektif produsen atau *supplier* adalah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi (Mulyadi 1999) dalam (Sigit ddk, 2017).

Biaya merupakan sejumlah nilai yang akan dikeluarkan dalam suatu kegiatan operasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan beban (*expenses*) merupakan penurunan nilai ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang akan mengakibatkan dalam penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal (Sigit dkk , 2017).

Dalam menganalisis biaya produksi perlu dibedakan antara dua jangka waktu yaitu biaya produksi dalam jangka pendek dan biaya produksi dalam jangka panjang dari perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa dalam jangka pendek perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan dalam jangka panjang semua faktor dapat mengalami perubahan Perbedaan tersebut perlu dilakukan pembedaan karena adanya perbedaan pada faktor yang mengalami perubahan dan biaya yang dikeluarkan pada biaya produksi dalam jangka pendek dan panjang (Mulyad , 1999). Perhitungan biaya produksi dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total dan biaya variabel total (Boediono , 2002), diformulasikan sebagai berikut :

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana:

TC = Total Cost Biaya total (Rp)

TFC = Total Fixed Cost / Biaya tetap total (Rp)

TVC = Total Variable Cost Biaya variabel total (Rp)

2.6. Penerimaan

Penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya Penerimaan merupakan keseluruhan produk yang dihasilkan dikalikan harga. Untuk menghitung besarnya penerimaan yang diterima, menggunakan rumus (Boediono,2002) :

$$TR = Q \times P$$

Dimana :

TR = QxP - Total Pendapatan Penerimaan total (Rp) -

Q = Quantity / Jumlah produk (kg)

P = Price / Harga (Rp)

2.7. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual (Soemarso S.R. 2009). Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan yang disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga dian sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan maupun keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan. semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka , pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa seringkali dijumpai dengan peningkatan pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak hanya bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik (Soekartawi 2012). Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Boediono,2002):

1. Jumlah faktor - faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada , hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian
2. Harga per unit dari masing - masing faktor produksi , harga ini ditemukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi

3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi . Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan , dan sebaliknya jika pendapatan wrun , pengeluaran konsumsi juga turun Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatan (Boediono , 2002) . Karakteristik pendapatan adalah (Hery dkk . 2012):

- a . Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba
- b . Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang - ulang atau berkesinambungan kegiatan kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada dibawah kendali manajemen

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda - beda . tetapi dari sudut kamansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik yaitu :

- a. Jika bertambah saldonya , harus dicatat di sisi kredit . Setiap pencatatan di sisi kredit berikan menambah saldo pendapatan tersebut
- b. Jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debet . Setiap pencatatan di sisi debet berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut .

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya (biaya tetap dan variabel) (Sapamoke (1992) Definisi tenebit diformulasikan sebagai berikut:

$$I = TR - TC$$

Dimana :

I = income/ pendapatan (Rp)

TR = total revenue/ penerimaan total (Rp)

TC = total cost / biaya total (RP)

2.8. Penelitian Terdahulu

Sebuah artikel yang mengkaji karakteristik, faktor motivasi dan dampak migrasi musiman di Ethiopia. Studi ini didukung oleh Kerangka Penghidupan Berkelanjutan. Baik daerah perkotaan maupun pedesaan sebagai tempat tujuan dan desa sebagai asal muasal migran telah dipertimbangkan. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner, wawancara informan kunci, diskusi kelompok terfokus, dan studi kasus rumah tangga. Kurangnya lahan pertanian, hutang, kurangnya kegiatan non-pertanian lokal, dan keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan merupakan alasan utama terjadinya migrasi tenaga kerja musiman. Jaringan sosial dan arus informasi juga merupakan faktor penting dalam migrasi. Penelitian ini menemukan bahwa laki-laki lajang sebagian besar terlibat dalam migrasi sementara partisipasi perempuan dapat diabaikan. Pendapatan yang diperoleh telah memungkinkan rumah tangga pedesaan untuk menambah pendapatan mereka dari pertanian dan secara tidak langsung berkontribusi dalam mengatasi masalah kelangkaan lahan pertanian. Waktu perpindahan yang bertepatan dengan musim sepi pertanian di dalam negeri membuat dampak migrasi keluar musiman terhadap pertanian menjadi minimal. Alih-alih melihatnya sebagai pilihan penghidupan masyarakat miskin pedesaan yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan penghidupan masyarakat miskin, migrasi masih dipandang negatif, dan hanya ada sedikit kesadaran akan pentingnya hal ini (Asfaw dkk,2010).

Di Afrika, penelitian menunjukkan adanya perpindahan penduduk tidak hanya tumbuh, namun juga feminisasi, diversifikasi dan urbanisasi (Adepoju, 2005; Awumbila dkk,2014), dan juga keterkaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan hasil kesejahteraan kompleks dan campur aduk. Ada semakin banyak bukti melalui studi mikro dan juga studi yang lebih besar survei bahwa migrasi dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan dapat menyebabkan akumulasi kekayaan rumah tangga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan daerah pengirim dan penerima (IOM, 2005, Ravallion et al. 2007; Yaro, 2008; Murrugarra et al.2011).

Meskipun migrasi dapat mewakili strategi penghidupan dan adaptasi dalam menanggapi permasalahan yang luas berbagai peristiwa dan perubahan struktural

(Awumbila et al. 2014), dampak kesejahteraan aktual dari fenomena ini telah menjadi sumber perdebatan dalam literatur. Sekitar tiga dekade lalu, dampak negatif migrasi mendominasi literatur. Dikatakan bahwa migrasi sering terjadi berdampak negatif terhadap perkembangan sosio-ekonomi daerah pengirim, sebagai akibat dari kekurangan pasokan tenaga kerja, penurunan produktivitas, dan brain drain. Daerah penerima migran juga diasumsikan demikian mencatat banyak permasalahan, termasuk tekanan terhadap fasilitas sosial, munculnya permukiman kumuh, yang semakin meningkat pengangguran, dan menurunnya standar hidup (Owusu dkk. 2008).

Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu terjadi. Telah diakui bahwa jika dikelola dengan baik, migrasi dapat memberikan kontribusi terhadap sosio-ekonomi transformasi perekonomian negara maju dan berkembang. Ada semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa migrasi dapat merupakan reaksi terhadap kemiskinan yang parah, atau suatu pilihan strategi mata pencaharian untuk meningkatkan kekayaan rumah tangga (Srivastava 2005).

Menurut (Ajaero dan Onokala 2013), migrasi tidak hanya berperan sebagai katalis dalam proses transformasi nasib masing-masing migran tetapi juga kondisi anggota keluarga yang ditinggalkan, lokal masyarakat, dan daerah pengirim yang lebih luas sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun begitu potensi peningkatan penghidupan masyarakat miskin, serta perubahan positif pada keduanya daerah pengirim dan penerima, hubungan antara migrasi dan kesejahteraan migran rumah tangga, secara historis, hanya mendapat sedikit perhatian baik dari kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan (Srivastava 2005; Awumbila dkk. 2014).